

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN:

1. Kondisi Setjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memenuhi persyaratan diterapkannya *Knowledge Management* (KM). Kondisi ini diketahui setelah dianalisis dengan menggunakan pendekatan 5 Enabler Nonaka. Pendekatan 5 enabler Nonaka adalah prasyarat yang harus dimiliki oleh suatu organisasi yang akan menerapkan *knowledge management*, yaitu *intention, autonomy, fluctuation and creative chaos, redundancy* dan *requisite variety*.
2. Kondisi yang harus ada agar *knowledge management* dapat diterapkan dengan baik adalah kondisi yang dimotivasi oleh *knowledge centric driver, technology drive, knowledge based organization drive* dan *personnel driverr*, adanya budaya *sharing* dan struktur organisasi yang mendukung. Sedangkan organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki hirarki rendah, intensitas administrasi cukup serta formalisasi, kompleksitas dan sentralitas organisasi yang tinggi.
3. Strategi yang dapat digunakan oleh organisasi Setjen Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan *knowledge management* adalah strategi pembelajaran organisasi dengan pendekatan spiral SECI dari Nonaka

SARAN:

1. Organisasi Sekretariat Jenderal MK dapat menerapkan *knowledge management* untuk pengembangan organisasi. *Knowledge management* membantu meningkatkan kinerja dan kapasitas serta kompetensi organisasi.
2. Organisasi harus memfasilitasi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran baik secara individu maupun secara organisasi.

3. Organisasi juga sebaiknya menyediakan wadah yang tepat untuk berbagi pengetahuan, bisa berupa forum diskusi, *learning forum*, *community of practice*, dan *coaching clinic*.
4. Perlu dipertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan kepada pegawai lebih bersemangat melaksanakan sharing informasi